



Media: BERNAS

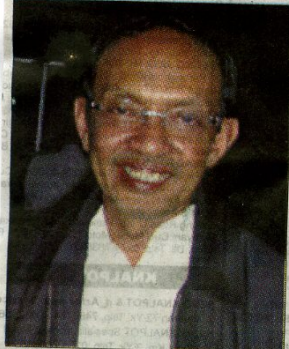
Hari: Rabu

Tanggal: 28 Januari 2009

Halaman: 1

Media Massa : *Bernas* Hari: *Rabu* Tanggal: *28-01-09* Halaman : *1*

Sosialisasi Indeks Persepsi Bersih Korupsi *Kalaupun Ada Korupsi, Paling Cuma Kecil-kecilan*



Herry Zudianto

WALIKOTA Yogyakarta, Herry Zudianto tak pernah menyangka kota yang dipimpinnya dinobatkan sebagai kota terbersih dari korupsi dari 50 kota di Indonesia oleh lembaga Transparency International Indonesia (TII) tahun 2008.

"Ini berkat adanya pembangunan partisipatif dari warga melalui Unit Pengolahan Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPPIK), sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pelayanan publik," katanya dalam Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Bersih Korupsi (IPK) Indonesia 2008 dan Indeks Suap di Jogja Plaza Hotel, Selasa (27/1).

Dia mengatakan dengan UPPIK timbul kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, yang kemudian memi-

tu terbentuknya komunikasi yang baik.

"Dengan komunikasi yang baik, pelayanan publik tentu akan lebih transparan dan akuntabel karena kinerjanya akan dipantau dengan mudah oleh masyarakat, walau pun ada korupsi paling cuma kecil-kecilan," lanjutnya.

Kebijakan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dalam satu atap di Dinas Perizinan juga menjadi kunci terjadinya transparansi, karena selama ini kasus korupsi maupun suap kerap melekat pada proses perizinan.

Salah seorang peneliti TII, Anita Rahman Akbarsyah menjelaskan metode survei dan desain riset yang digunakan TII tahun 2008 berbeda dibandingkan metode pada tahun

2004 dan 2006.

"Perbedaannya penelitian kami khususkan hanya kota bukan lagi kabupaten," jelasnya.

Definisi korupsi pun diperjelas dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dengan waktu survei antara September sampai Desember 2008 di 50 kota; 33 di antaranya ibu kota provinsi, ditambah 17 kota besar.

Total responden sebanyak 3.841 orang dengan rincian 2.371 (60 persen) pelaku bisnis, 1.074 (30 persen) pejabat publik dan 396 (10 persen) tokoh masyarakat. Dari hasil survei didapat tingkat korupsi di pemerintahan daerah masih tinggi

dengan total rata-rata IPK 4,42.

"Yogyakarta yang dinyatakan kota bersih korupsi pun masih mengkhawatirkan karena IPK-nya hanya 6,43 menyusul kemudian Palangkaraya 6,1. Sedangkan kota-kota lain IPK-nya masih di bawah 6," lanjutnya.

Selain menyusun indeks korupsi, TII juga meneliti kasus suap di 15 institusi publik. Institusi kepolisian masih menjadi institusi dengan kasus suap tertinggi. Dari 1.218 interaksi antar pejabat publik dan masyarakat, 48 persennya terkandung unsur suap dengan rata-rata jumlah uang Rp 2.273.000.

"Tapi jumlah uang suap tertinggi ada di pengadilan, jumlahnya Rp 102.412.000 per interaksi," lanjut Anita. (c8)

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Terbunduk Kepada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 21 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005